



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Januari 2017.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016; 2. Permasalahan dan Solusi APBN Perubahan TA 2016; 3. Realisasi Target Kinerja Dibandingkan dengan RKP Tahun 2016; 4. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2017; dan 5. Permasalahan dan Antisipasi APBN TA 2017.
Hadir	: 45 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Muhadjir Effendy/Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.45 WIB oleh Drs. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyampaikan beberapa hal antara lain:

1. Realisasi daya serap APBN Perubahan TA 2016 per akhir Desember 2016 adalah sebesar 89,23% (Rp38,908 triliun dari total pagu Rp43,605 triliun).
2. Capaian kinerja Kemdikbud RI Tahun 2016 yang tidak memenuhi target sbb:

No	Indikator	Satuan	Target 2016	Realiasi 2016	Persentase
1	Unit Sekolah Baru	Sekolah	674	657	97,47%
2	Ruang Kelas Baru	Ruang	14.223	14.125	99,31%
3	Tunjangan Profesi Guru (PNS dan Non PNS)	Guru	1.508.498	1.433.322	95,02%
4	Ruang Kelas Baru SMK	Ruang	5.662	5.478	96,75
5	Unit Sekolah Baru SMK	Unit	241	216	89,63
6	Pengembangan SMK Kemaritiman	Sekolah	50	43	86,00%
7	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktik	Ruang	4.165	3.086	74,09%
8	Sekolah Rujukan	Sekolah	2.002	1,919	95,85%
9	Revitalisasi Museum	Museum	24	17	70,83%

3. Pada tahun 2016 Kemdikbud RI berhasil memperoleh predikat opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan TA 2015, indeks kepuasan pemangku kepentingan berdasarkan penilaian KemenPAN&RB dengan nilai sementara pada tahun 2016 adalah BB (sangat baik), mendapat penghargaan APE kategori Pratama, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan target nilai 75.
4. Pagu definitif APBN TA 2017 Kemdikbud adalah sebesar Rp39,823 triliun dengan rencana penyerapan anggaran sbb:

(dalam persentase)

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
1,76	4,94	9,29	15,56	21,51	28,87	39,15	49,19	60,02	71,02	89,98	97

B. Komisi X DPR RI mendesak Kemdikbud RI untuk:

1. Menyusun peta jalan pendidikan nasional dalam rangka menyiapkan generasi emas 100 Tahun Indonesia Merdeka.
2. Menyampaikan peta jalan, model/desain, dan target program penguatan pendidikan karakter bangsa dalam rangka implementasi program pembumih Pancasila dan budi pekerti pada proses pendidikan sebagai bagian program pendidikan nasional.
3. Melengkapi penjelasan secara komprehensif terhadap korelasi data peningkatan rata-rata lama sekolah dengan APK, dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

4. Merencanakan dan melaksanakan PIP berbasis data yang valid/akurat misalnya dengan menggunakan dapodik, dan untuk efektifitas pelaksanaannya maka dalam penyaluran dan pencairannya perlu berkoordinasi dengan K/L dan pemangku kepentingan terkait.
 5. Mengevaluasi kebijakan pendidikan antara lain mengenai nilai minimal UKG, tata kelola sertifikasi, linieritas bidang studi sertifikasi guru, penanganan guru-guru mapel bahasa daerah, penanganan guru honorer, kebijakan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, perlindungan guru, 13 syarat penggunaan dana BOS, program PAUD, kurikulum, daerah 3T, dan Permendikbud No 75 Tahun 2016 dikaitkan dengan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 6. Melengkapi penjelasan secara komprehensif atas perbedaan hasil Raker tgl. 24 Okt 2016 dengan bahan Raker tgl. 19 Jan 2017, seperti: peningkatan akses pendidikan, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, penguatan substansi pendidikan dan kebudayaan, Program Indonesia Pintar, dan penguatan vokasi.
 7. Menyampaikan progres pelaksanaan Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
 8. Menyampaikan perencanaan, peta jalan (*roadmap*), tahapan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kab/kota ke provinsi, dan pola sinkronisasi dan koordinasi terhadap sejumlah peraturan yang terkait seperti PP, Permen, Perda maupun peraturan lainnya utamanya untuk persoalan guru sesuai dengan kewenangan Kemdikbud.
 9. Mengantisipasi berbagai permasalahan yang kemungkinan muncul di tahun 2017 agar target yang telah ditetapkan pada RKP dapat terwujud, melalui kerjasama dengan K/L, dan para pemangku kepentingan terkait.
 10. Menyampaikan langkah-langkah yang telah dan yang belum dilakukan atas rekomendasi Panja PIP dan Panja Perfilman Komisi X DPR RI.
 11. Melengkapi data pokok pendidikan per 31 Desember 2016, dan RKA-K/L Tahun 2017 Kemdikbud.
 12. Menyampaikan jawaban secara tertulis atas tanggapan/masukan/pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, dan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada poin II.B.1 s.d. 11 paling lambat pada tanggal 3 Februari 2017.
- C. Komisi X DPR RI dan Mendikbud RI sepakat akan melakukan Raker lanjutan sebelum penutupan masa sidang III (tentatif: sebelum tgl. 24 Feb 2017)) dengan agenda pendalaman jawaban tertulis Kemdikbud RI sebagaimana dimaksud pada poin II.B.

D. Komisi X DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemdikbud RI atas prestasi yang diraih pada tahun 2016 seperti: daya serap sangat baik, target kinerja antara RKP dengan realisasi sebagian besar tercapai, opini WTP tahun 2015, penilaian sementara dari KemenPAN&RB dengan nilai BB (sangat baik), dan penghargaan APE kategori Pratama.

III. PENUTUP

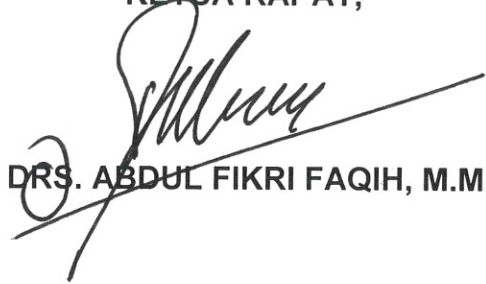
Rapat ditutup pada pukul **14.50** WIB

**MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN RI**



MUHADJIR EFFENDY

KETUA RAPAT,



DRS. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.